

## **BAB II**

### **FEMINISME DAN KIPRAH LEMBAGA PERS MAHASISWA DALAM INSTITUSI PENDIDIKAN**

Dalam memberitakan suatu peristiwa, organisasi media memiliki kebijakan redaksional yang berbeda-beda. Kebijakan tersebut tentu saja memberikan ciri khas yang berbeda dalam setiap pemberitaan mereka. Karena itu sangatlah penting untuk memahami profil suatu media. Dengan memahami profil media tersebut diharapkan akan membantu frame yang mereka kembangkan pada suatu peristiwa yang sama. Balairungpress selama ini dikenal sebagai lembaga pers mahasiswa yang independen dan objektif dalam pemberitaan. Untuk melihat secara lebih jelas bagaimana *historical situadness* perempuan dan bingkainya dalam pendidikan, terutama dalam berita pers mahasiswa, peneliti mencoba menguraikannya sebagai berikut.

#### **2.1 Feminisme di Indonesia**

Gerakan feminisme mulai muncul di Indonesia ketika masa penjajahan Belanda. Saat itu, banyak perempuan yang rela mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Beberapa tokoh yang terkenal pada masa itu seperti Nyi Ageng Serang yang ikut berperang di masa Perang Diponegoro dan Martha Christina Tiahahu yang ikut berperang pada perang Maluku. Kemudian setelah itu ada Cut Nyak Dien, yang ikut berperang melawan Belanda di Perang Aceh. Ketiga tokoh tersebut kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia.

Gerakan feminisme makin menguat ketika muncul RA Kartini. RA Kartini memperjuangkan kesetaraan pendidikan bagi kaum perempuan. Pada masa itu, perempuan kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. Hanya perempuan bangsawan yang bisa sekolah itupun hanya sampai tingkat dasar. RA Kartini adalah anak bangsawan yang saat itu bisa bersekolah. Ketika menempuh masa pendidikan, RA Kartini mengamati perlakuan penjajah terhadap perempuan saat itu sangat tidak adil. Berangkat dari situlah, RA Kartini mendirikan sekolah untuk perempuan. Tak berlangsung lama setelah itu, RA Kartini juga diangkat sebagai pahlawan nasional dan disebut sebagai pahlawan emansipasi wanita.

## **2.1.1 Sejarah Feminisme di Indonesia**

### **2.1.1.1 Era Kolonialisme**

Feminisme di era kolonialisme ditandai dengan kebangkitan perempuan melawan diskriminasi. Kebangkitan tersebut dimulai dengan bermunculannya sekolah untuk perempuan Indonesia. RA Kartini dan Dewi Sartika adalah beberapa tokoh yang memelopori berdirinya sekolah-sekolah tersebut.

Pergerakan selanjutnya adalah dengan berdirinya organisasi-organisasi perempuan. Organisasi pertama yang berdiri adalah Putri Mardika pada tahun 1912. Setelah itu banyak organisasi perempuan yang berdiri baik di Jawa maupun di daerah lain. Kemudian pada 22 Desember 1928, diadakan Kongres Perempuan Pertama di Yogyakarta. Kongres ini dicetuskan oleh Soejatin yang mempertemukan kelompok dan organisasi perempuan dari berbagai latar belakang (Prabowo, 2018 : 53). Menurut Gadis, pendiri *Junral Perempuan*, tahun 1928 ketika kongres

perempuan pertama, perempuan Indonesia sudah memikirkan berbagai persoalan. Kongres itu menentang praktik pernikahan anak, mendukung pendidikan bagi perempuan, serta menolak segala bentuk pemaksaan terhadap kebebasan berpakaian perempuan. Kongres ini kemudian diadakan setiap tahun sampai 1941.

#### **2.1.1.2 Era Pendudukan Jepang**

Pada tahun 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Hal ini kemudian mempengaruhi feminisme yang sedang tumbuh di Indonesia. Jepang kemudian membentuk Fujinkai. Organisasi bentukan Jepang ini bertujuan untuk mengerahkan perempuan agar turut serta dalam memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana berupa uang dan logistik untuk perang.

#### **2.1.1.3 Era Kemerdekaan**

Setelah menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak begitu saja lepas dari penjajahan. Pada masa ini pergerakan perempuan muncul dengan aktifnya kembali kongres perempuan dari tahun 1946-1949. Pada masa itu perempuan juga turut bergabung untuk berperang mengusir Belanda.

#### **2.1.1.4 Era Orde Lama**

Setelah era kemerdekaan, pergerakan perempuan menemui kemerosotan. Banyak organisasi perempuan akhirnya bubar. Sampai pada tahun 1950, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) berdiri. Organisasi ini menyuarakan: sukseskan pemilu, anti perkosaan, peningkatan kesadaran perempuan tani, berantas buta huruf, hukuman berat bagi pemerkosaan penculikan, pendidikan masalah politik, kesehatan, dan monogami. Gerwani kemudian berkembang menjadi organisasi perempuan terbesar

saat itu. Di samping Gerwani, muncul juga organisasi Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari).

#### **2.1.1.5 Era Orde Baru**

Pada awal sebelum orde baru berkuasa, PKI beserta organisasi bawahannya dibubarkan dan dinyatakan terlarang. Gerwani termasuk ke dalam organisasi tersebut. Yang tersisa hanya Perwari. Pada tahun 1978, kemudian Perwari melebur ke dalam Golkar dan habislah organisasi perempuan independen. Pada era orde baru ini, muncul beberapa organisasi perempuan seperti Dharma Wanita dan PKK. Organisasi ini berkembang begitu pesat di kalangan masyarakat karena banyak mendapat bantuan dan pengaruh dari pemerintahan saat itu.

#### **2.1.1.6 Era Reformasi**

Runtuhnya Orde Baru yang telah menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bertahan selama 32 tahun telah membawa implikasi dan krisis yang bersifat multidimensi. Berbagai belenggu yang menyangkut kebebasan berorganisasi, berpendapat dalam setiap aspek kelembagaan baik formal maupun non formal telah membuka pintu derasnya arus demokrasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam era reformasi, munculnya berbagai organisasi wanita yang membangkitkan kembali para reformis wanita seperti tahun 1930-an yang tidak saja membela kaumnya sendiri, melainkan juga membela dan memikirkan nasib masyarakat marjinal, berbagai organisasi LSM yang membela rakyat kecil antara lain Wardah Hafiz, kelompok perempuan yang menamakan Suara Ibu Peduli yang membela hak anak, Ratna Sarumpaet yang memperjuangkan demokrasi dan hak buruh perempuan lewat organisasi Teaternya, Nursyahbani Kacasungkana yang membela

wanita dari obyek kekerasan dan kejahatan melalui supremasi hukum, tidak ketinggalan Ibu Aisyah Amini yang telah berkiprah dalam dunia politik sejak lama, serta masih banyak lagi tokoh wanita Islam lainnya yang berkiprah dalam organisasi wanita.

### **2.1.2 Perkembangan Feminisme Saat Ini**

Kesetaraan gender masih menjadi isu yang diperdebatkan di Indonesia. Feminisme sebagai dasar dari isu masih belum mampu secara penuh memperbaiki sistem patriarki yang memojokkan hak-hak perempuan. Usaha untuk memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan masih berlanjut hingga saat ini. Salah satu usaha yang cukup unik adalah pencetusan Feminisme Pancasila. Dalam feminisme pancasila, ide feminisme juga bagian dari nilai-nilai bangsa kita, yaitu feminisme yang bersandar pada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, serta mengedepankan demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ide feminisme ini hadir dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi sebagai nilai Pancasila.

Ada hal mendasar yang harus ditinjau dan direfleksikan dari sejarah peran perempuan di Indonesia. Pertama, narasi sejarah membuktikan bahwa terdapat tata kelola masyarakat yang timpang antara perempuan dan laki-laki. Akar penindasan perempuan bermula dari sistem feodalisme yang berlangsung sangat lama di abad pertengahan. Feodalisme tersebut berlanjut dengan adanya aksi kolonialisme Barat yang tergambar dalam kisah Kartini tentang feodalisme (Pramoedya, Panggil Aku Kartini Saja).

Laki laki dianggap sebagai pemeran utama dalam tatanan masyarakat dalam praktik feodalisme. Simbol kekuasaan dan kekuatan selalu diidentikkan dengan

laki-laki. Sedangkan, perempuan dijadikan sebagai pemeran pelengkap yang bekerja dalam lingkup domestik. Sehingga, anggapan bahwa perempuan adalah the second sex (Simone de Beauvoir) ternyata tertanam kuat dalam jejak sejarah masyarakat kita.

Kedua, pergeseran rezim dari Orde Lama menuju Orde Baru tidak serta merta mendatangkan kesejahteraan bagi semua kalangan. Aktivisme perempuan itu sendiri bahkan dikesampingkan akibat konstruksi mental yang dilakukan oleh negara telah cukup kuat sehingga menyebabkan perempuan mengalami hegemoni dan berdampak pada melemahnya daya kritis.

Kondisi ini bermula sejak penghancuran Gerwani dan PKI pasca G30S/PKI dan pemberlakuan politik state-ibuisim oleh rezim Soeharto. Semangat patriarki telah melanggeng dalam kurun waktu yang sangat lama, bersamaan dengan spirit kolonialisme yang dibawa oleh negara-negara penjajah : menaklukkan dan menguasai. Tidak hanya itu, ia didukung oleh institusi paling kuat di atas muka bumi ini yaitu negara.

Dampak psikologis yang cukup kuat bagi eksistensi perempuan pun ditunjukkan hingga hari ini. Perempuan telah dinilai nyaman dengan kondisi status quo patriarki yang berawal dari perempuan secara terstruktur dan intens selama berpuluh-puluh bahkan berabad abad lamanya. Alasan utama perempuan menolak ide feminisme adalah karena ide ini dianggap sebagai produk barat dan asing.

Implisit bias menjadi diksi yang dimunculkan untuk menggambarkan kondisi ini. Biasanya juga dikenal sebagai kognisi sosial implisit, yaitu kondisi ketika sikap

atau stereotip mempengaruhi pemahaman, tindakan dan keputusan kita secara tidak sadar.

Bias ini aktif tanpa adanya kesadaran individu atau kontrol yang disengaja. Bias ini juga dipilih orang untuk menyembunyikan tujuan kebenaran sosial dan politik. Bias inilah yang menciptakan perasaan dan sikap tentang orang lain berdasarkan karakteristik seperti ras, etnis, usia, gender dan penampilan. Hal itu juga bisa berpotensi menghalangi orang untuk bersikap open-minded dan menyebabkan bertahannya perasaan inferior.

Terlepas dari pro maupun kontra untuk ide feminisme, menilai penting tidaknya ide feminisme di Indonesia sebenarnya bisa dilihat dari relasi power yang terjadi selama ini dalam kehidupan bermasyarakat kita. Posisi pekerjaan, peran sosial, sudut pandang, serta kekerasan yang masih berpedoman pada maskulinitas akhirnya membelenggu sebagian perempuan sampai saat ini.

Nyatanya, tidak ada ideologi pembebasan lain yang dapat menyelamatkan perempuan dari praktik-praktik pelemahan kecuali ide feminisme. Untuk itulah, feminisme sejatinya masih sangat relevan bagi perempuan perempuan negara dunia ketiga yang masih memiliki persoalan mendasar mengenai bias dan cara pandang dalam menempatkan posisi perempuan dalam kondisi yang setara di mata hak asasi manusia.

Pendidikan gender menjadi hal yang diperlukan karena belum banyak masyarakat yang sadar tentang pentingnya keadilan perspektif bagi perempuan, edukasi tentang bagaimana feminisme yang efektif menjadi solusi alternatif bagi beberapa kondisi pelemahan perempuan. Kondisi ideal yang ingin diwujudkan pada

akhirnya adalah tidak adanya labelisasi gender dalam sebuah sistem sosial masyarakat yang mengedepankan kebijakan public yang tidak bias gender.

Praktik feminisme di Indonesia mulai diawali dari gerakan politik pendidikan yang dimulai dengan mendukung calon eksekutif perempuan dan membuat kontrak politik atau masuk ke dalam parlemen karena legislatif mempunyai otoritas untuk membuat Undang-Undang. Jika kita berpedoman bahwa feminisme adalah norma dari yang harus diperjuangkan, maka untuk membuat norma menjadi taken for granted perlu adanya sebuah upaya institusionalisasi.

## 2.2 Isu atau Permasalahan Perempuan di Indonesia

Permasalahan perempuan masa kini masih menunjukkan sebagian gambaran permasalahan masa lalu yang belum terselesaikan.

**Tabel 2.1**  
**Permasalahan Perempuan di Indonesia**

No.	Persoalan	Frekuensi	Persen
1.	Jumlah perempuan dalam posisi pengambil keputusan sedikit	96	92,3
2.	Perempuan korban kekerasan/pelecehan seksual kurang mendapat perlindungan hukum	91	87,5
3.	Upah pekerja perempuan lebih rendah dari upah laki-laki	82	78,8
4.	Pelecehan seksual terhadap perempuan terjadi di lingkungan pekerjaan	79	76,0
5.	Perempuan cenderung dijadikan obyek seksual di media massa	78	76,0
6.	Tidak adanya perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga perempuan	78	75,0
7.	Terjadinya eksploitasi terhadap perempuan melalui pengiriman TKW ke luar negara	78	75,0
8.	Tidak sepenuhnya hak cuti khusus bagi pekerja perempuan	73	70,2

Keterangan : jumlah sampel = 108

Saat ini, emansipasi sudah bukan menjadi satu-satunya problem perempuan saja. Bagaimana perempuan mampu dimanusiakan pun sekarang menjadi bahasan yang harus dituntaskan. Kekerasan seksual yang masih marak terjadi, bahkan fenomena *catcalling*, masih menunjukkan perempuan dianggap sebagai barang. Faktor yang mempengaruhi maraknya isu kekerasan seksual sekarang adalah kondisi sosial-ekonomi. Masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Saat ini perempuan Indonesia memiliki peran ganda, disatu sisi sebagai ibu rumah tangga dan disisi lainnya sebagai wanita karier yang ternyata belum diimbangi oleh perubahan infrastruktur dan tata nilai-nilai religius yang memadai. Arus peran ganda ini merupakan konsekuensi logis dari hadirnya industrialisasi dan urbanisasi serta kondisi ekonomi negara yang ada dalam krisis berkepanjangan. Dalam transformasi menuju era masyarakat industri dan kondisi krisis tersebut, wanita dipaksa menanggung beban keluarga, menjadi tenaga pekerja. Rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dibuktikan melalui ketrampilan yang dimiliki buruh, menjadikan buruh wanita tergolong dalam kelompok vulnerable (kelompok rentan) yang pasti masuk dalam lingkungan kerja yang berpredikat 3D (*dirty/kotor, dangerous/bahaya, dan difficult/sukar*). Pelecehan seksual dan kriminalitas di kawasan industri menunjukkan frekuensi sangat tinggi. Kompas Agustus 2000 menunjukkan bahwa rata-rata angka aborsi di Indonesia telah menunjukkan 2 juta /tahun yang lebih tinggi dari rata-rata di dunia 1,7 juta/tahun. Obyek penelitian ini dilakukan disekitar Jakarta (Jabotabek). Demikian pula wanita perdesaan, ia

mempunyai peran sama dengan pria yang tidak selalu menyandarkan dirinya pada pria (Djoeffan, 2001 : 292).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan menunjukkan bahwa 60% perempuan Indonesia harus menghidupi diri sendiri dan keluarganya (Kompas dalam Djoeffan, 2001 : 93). Selain itu kondisi umum keterlibatan perempuan dalam pembangunan tidak menghasilkan manfaat bagi perempuan sendiri. Sukses besar peran perempuan dalam menurunkan angka kelahiran 6,2% pada tahun 1970-an menjadi 3,2% pada tahun 80-an ternyata tidak diikuti oleh berubahnya status kesehatan perempuan.

Meskipun permasalahan terbesar di Indonesia adalah kondisi sosial ekonomi, hal tersebut tidak berarti mengarahkan bahasan dalam penelitian ini kepada kritik patriarki yang berujung pada motif kapitalisme. Isu kekerasan seksual yang menjadi isu teratas dalam permasalahan perempuan di Indonesia membuat peneliti ingin mengetahui apakah praktik patriarki yang secara tidak sadar tumbuh dalam cara pandang newsroom pers mahasiswa (dalam hal ini Balairung) dapat membuat pemaknaan yang tidak adil gender untuk korban itu sendiri.

Kekerasan seksual terjadi ketika daya tawar atau posisi korban lebih rendah dibandingkan pelaku dan adanya dominasi dari pelaku terhadap korban. Kekerasan seksual hingga kini belum dianggap sebagai kekerasan dengan tingkat kejahatan tinggi. Hal ini akhirnya berdampak terhadap ketidakwaspadaan kita untuk mencegah kekerasan seksual itu sendiri. Akibatnya, nilai kemanusiaan kita sebagai manusia menjadi berkurang. Untuk memulihkan kembali nilai-nilai

kemanusiaan, maka harus dilakukan melalui tindakan-tindakan yang adil dan beradab, baik kepada korban, pelaku maupun masyarakat.

Dari Jurnal “Sejauh Mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual” yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan disebutkan bahwa kekerasan seksual dapat dilakukan dan dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam naskah ini, perhatian Komnas Perempuan diberikan kepada pengalaman perempuan berhadapan dengan Kekerasan Seksual.

“Kekerasan seksual menjadi isu yang rumit dan sangatlah penting dalam sejarah peta kekerasan. Hal ini dikarenakan adanya dimensi khas yang menyangkut sendi kehidupan perempuan. Akar kekerasan seksual terhadap perempuan berasal dari persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Kondisi yang timpang ini diperparah ketika satu pihak (pelaku) mempunyai kendali lebih dan posisi tinggi dibanding korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Tidak hanya itu, pola kendali pun muncul dari adanya hubungan seperti orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga atau kelompok bersenjata-aparat sipil” (sumber : Komnas, 2015 : 13).

### **2.3 Pemberitaan Kekerasan Seksual di Berbagai Media Massa**

Media masih saja menempatkan perempuan sebagai objek dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual. Dilansir dari Tirto.id, Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin dalam diskusi ‘Reproduksi Mitos Perkosaan di Media’ yang diselenggarakan di Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019), mengatakan bahwa posisi media dan publik tidak setara. Media punya kekuasaan dalam menarasikan dan orang hanya menerimanya. Hal ini membuat tak jarang media masih semena-mena dan tidak memperhatikan kode etik dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual,

bahkan belum menyadari akan pentingnya evaluasi dan perbaikan untuk ke depan (Abdi, 2019 : 1).

Mariana juga menyebutkan contoh dari pembingkaiian korban perempuan dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual di salah satu media massa yang berjudul “Gadis 14 Tahun Digagahi Empat Pria Secara Bergilir”. Dalam berita tersebut, terdapat beberapa diksi atau pilihan kata yang menunjukkan suatu nilai kejahatan maskulin seperti kata ‘digagahi’. Begitu juga dengan pemakaian kata ‘gadis’ dan ‘secara bergilir’ yang menimbulkan imaji hubungan seksual pada pembaca. Pilihan kata gadis, janda, cantik atau digagahi mengandung nilai yang cabul dan tidak adanya empati pada korban. Kondisi sosial budaya seperti biasa dinamakan sebagai rape culture atau budaya yang menormalkan sebuah perkosaan dalam sistem masyarakat patriarkis. Pemilihan kata tersebut juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah hal yang biasa dan menegaskan bahwa laki-laki dengan nafsu birahinya adalah sesuatu yang normal. Sementara bagi perempuan, menjadi korban pemerkosaan adalah sesuatu yang harus diterima. Oleh sebab itu, membongkar nilai patriarkis dari berbagai kata yang media gunakan menjadi fokus utama untuk perbaikan kualitas dan kredibilitas pemberitaan di media saat ini.

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan diterbitkan dalam jurnal (Komnas, 2015 : 65) dari bulan Juli sampai Desember 2015 maka terdapat 44 berita yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan/mengutip narasumber yang bias. Dari 44 berita tersebut, maka Pos Kota merupakan media yang paling sering melanggar (19 berita), selanjutnya adalah Indopos (10 berita), dan Kompas (6 berita).

#### **2.4 Perspektif Keadilan Gender bagi Perempuan di Ranah Pendidikan**

Sejumlah paparan dari Tirto.id mempertegas bahwa kasus kekerasan seksual di kampus pun menjadi fenomena yang terus terulang ketika ketimpangan gender masih menjadi hal umum. Dari beberapa kasus yang sudah muncul menunjukkan indikasi bahwa kampus belum memiliki keseriusan untuk menyelesaikan kasusnya maupun mencegah kejadian serupa terulang.

Keterwakilan perempuan dalam posisi pengambil kebijakan berdampak pada banyak aspek lain dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia. Keterwakilan yang masih minim ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utama penentu minimnya keterwakilan yang minim adalah akibat budaya patriarki. Prioritas budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin secara tidak langsung membuat perempuan sulit untuk menapaki jenjang karier karena laki-laki cenderung dipromosikan dengan potensinya sedangkan perempuan akan dihargai dengan apa yang sudah dia perbuat atau lakukan.

Sedangkan, perguruan tinggi dikelola dengan belum adanya kesadaran gender yang mumpuni sehingga kurang menyediakan fasilitas yang dapat mendukung kinerja perempuan di kampus. Sejumlah perguruan tinggi telah mencoba keluar dari permasalahan ini dengan menawarkan solusi berupa kebijakan afirmatif yang berguna untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, terutama dalam hal kepemimpinan. Keterwakilan perempuan dalam unsur pimpinan penting guna memastikan setiap kebijakan dalam perguruan tinggi mengakomodasi keadilan gender. Pengalaman sehari-hari perempuan bisa menjamin munculnya kesadaran tentang perlunya kebijakan yang tepat guna untuk mendorong

pengembangan karir perempuan dan menyediakan ruang aman bagi perempuan di lingkup kampus.

## **2.5 Sejarah Berdirinya Lembaga Pers Mahasiswa sebagai Kontrol Sosial dalam Ranah Pendidikan**

Ferdyant (2016 : 1) dalam artikelnya Menilik Pers Mahasiswa; Dulu dan Kini mengemukakan bahwa pers mahasiswa sebenarnya sudah ada sejak pascamerdeka. Namun, di era tersebut, Pers Mahasiswa belum benar-benar mengembangkan sayapnya. Persma mulai muncul pada tahun 1945-1948 ketika para mahasiswa ikut ambil peran dalam pembentukan raga politik Indonesia. Keadaan ini membuat Persma menjadi stagnan tanpa perkembangan yang berarti. Saat itulah, pemuda Indonesia bertekad untuk kembali ikut berperan serta dalam mengembangkan bangsa. Semangat mereka berkorbar setelah predikat bangsa terjajah yang mendarah daging selama berabad abad berhasil mereka tumbangkan karena Persma saat itu memiliki andil besar dalam meruntuhkan kekuasaan penjajah yang telah berakar. Sejak saat itulah, anggota Persma berjanji akan menjadi salah satu pondasi yang menopang berdirinya bangsa yang kokoh.

Pers Mahasiswa mulai memekarkan kembali gelora perjuangannya setelah tahun 1950. Dalam era ini banyak Pers Mahasiswa yang bermunculan di berbagai kampus. Seiring dengan menjamurnya Persma tersebut, aspirasi dan ide-ide segar kian bertebaran. Kampus diwarnai oleh semangat perjuangan yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Persma menemui masa emasnya. Bahkan saat itu Persma bisa dikatakan lebih gemilang dibanding pers umum.

Karena produktivitasnya yang tinggi dan perkembangan dari sisi komersial dan redaksional, pada tahun 1955 Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI) didirikan. IPMI menjadi organisasi yang menandakan sebuah konsolidasi antar Persma. Barulah pada tahun 1955 lahir Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI), sebuah organisasi yang menandakan sebuah konsolidasi antar Pers Mahasiswa. Organisasi ini juga beriringan dengan transisi sistem pemerintahan dari Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin. Saat itu IPMI beserta ormas lainnya berupaya meruntuhkan pemerintahan yang dinilai otoriter. Hingga hasilnya berakhirlah Orde Lama dan muncul babak baru yaitu Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, Pers Mahasiswa dan para birokrat berjalan berdampingan tanpa gesekan yang berarti. Namun keadaan tersebut tidak terlalu lama. Hingga pada tahun 1970 Pers Mahasiswa mulai diawasi dan dibatasi gerak-geriknya. Ancaman pembredelan menjadi senjata utama pemerintah dalam menekan kegiatan Pers Mahasiswa. Kebebasan Pers pada saat itu benar-benar hilang. Setiap kata dan kalimat dalam media seakan dimonitori oleh pemerintah. Mulai saat itulah Indonesia kehilangan keluguannya.

Pers Mahasiswa yang mengalami masa kritis pada waktu itu, akhirnya kembali bangkit. Persma melakukan upaya upaya penyelamatan diri dari pembredelan. Salah satunya adalah dengan membentuk kembali wadah konsolidasi yang bernama Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia (PPMI). PPMI didirikan pada tahun 1992.

PPMI menggunakan redaksional “penerbit” untuk menyiasati pemerintah pada waktu. Karena kata pers dinilai kata yang haram diucapkan dan mengandung

ancaman nyata, maka mereka bersepakat untuk mengganti redaksional “pers”. Perjuangan PPMI terus mengalir seiring pemerintah yang kian tua. Meskipun berganti nama, namun semangat Pers Mahasiswa yang bergerak secara sembunyi tak kehilangan semangatnya sedikitpun. Mereka terus menyuarakan kebenaran dan perubahan.

Mei 1998, saat bersejarah bagi mahasiswa. Perjuangan mati-matian menurunkan rezim Soeharto menuai hasil. Kurang lebih setelah satu bulan sebelumnya Soeharto kembali terpilih menjadi presiden Indonesia. Inflasi dalam sektor ekonomi dan pengangguran yang semakin meluas menjadi alasan utama yang mendasari aksi mahasiswa. Mahasiswa dalam berbagai elemen, juga di dalamnya Pers Mahasiswa, bersatu untuk meruntuhkan tirani yang dianggap sebagai biang keladi rusaknya negeri ini. Dengan gejolak semangat dan teriakan yang tak henti, akhirnya Soeharto mundur sebagai RI satu. Sebuah kemenangan bagi mahasiswa. Sebuah kebebasan bagi Pers Mahasiswa. Suka cita tersebut kembali meletup pada Jumat tanggal 5 Juni 1998, saat Yunus Yosfiah selaku Menteri Penerangan RI Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah Presiden B.J. Habibie, memerdekakan insan pers Indonesia. Setelah pencabutan Peraturan Menteri Penerangan RI No. 01/PER/MENPEN/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Sejak itulah pers mengalami pertumbuhan yang sangat pesat hingga ke daerah-daerah.

Dulu, hanya jurnalis profesional-lah yang bisa melakukan kegiatan jurnalistik. Berbeda halnya dengan sekarang. Setiap orang bisa melakukan kegiatan

jurnalistik dan melaporkan berita kepada masyarakat luas. Istilah yang digunakan untuk perkembangan jurnalistik tersebut disebut dengan *citizen journalism*.

Citizen journalism atau jurnalisme warga adalah suatu konsep bagi masyarakat awam atau publik yang bermain secara aktif dalam mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, serta menyebarkan berita dan informasi (Bowman dan Wills, 2003). Adapun maksud dari masyarakat awam atau publik disini adalah setiap orang tanpa memandang latar belakang pendidikan maupun keahlian. Mahasiswa termasuk dalam kriteria tersebut.

Secara esensi, kegiatan jurnalistik melalui pers mahasiswa tidak jauh berbeda dengan dunia pers profesional pada umumnya. Pers mahasiswa lebih banyak menyoroti dunia kampus, serta bagaimana mengungkap problematika berdasar kacamata atau perspektif mahasiswa. Kontennya pun beragam. Mulai dari kritik sosial-politik, ekonomi, bahkan hal hal ekspresif yang berkaitan dengan pergerakan dan dinamika mahasiswa. Gaya hidup, hiburan, maupun prestasi pun turut ditampilkan. Sama halnya dengan pers profesional, jurnalis mahasiswa juga dituntut memiliki kemampuan menulis, analisis kritis, mengusut kasus dan juga insiatif dalam investigasi sebuah permasalahan dengan tetap menjaga kode etik jurnalistik.

Seiring dengan perkembangan zaman, ketika fasilitas media sekarang mengalami perkembangan, begitu pula dunia pers yang berekspansi ke dunia online. Citizen journalism pun semakin mudah ditemui. Begitu pula dengan perkembangan jurnalistik dalam lingkup pers mahasiswa. Fasilitas demi fasilitas

di era reformasi semakin ditunjang untuk mendulang keterbutuhan informasi yang semakin beragam.

Sebanyak apapun pertumbuhan pers di Indonesia, pers mahasiswa tetap menjadi dunia tersendiri yang mewarna sejarah perjalanan dari pers mahasiswa. Pers mahasiswa pun dinilai konsisten dengan prinsipnya yaitu jurnalisme kerakyatan. Prinsip ini menjadi prinsip yang dipertahankan olehnya di tengah hiruk-pikuk pers yang berorientasi pada nirlaba atau ideologinya. Inilah yang menjadi pembeda antara pers secara umum dengan pers mahasiswa. Prinsip yang tidak mengedepankan kepentingan ekonomi di baliknya ini dipercaya mampu mempertahankan prinsip independen yang dipegang teguh oleh pers mahasiswa.

## **2.6 Profil Balairungpress**

Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalisme dalam lingkup universitas. Sejak awal berdirinya pada 29 Oktober 1985, Balairung sudah menerbitkan produk perdananya pada 8 Januari 1986.

Visi BPPM Balairung adalah menjadi pers dengan Nafas Intelektual Mahasiswa. Harapan adanya visi ini adalah dengan adanya BPPM Balairung, kesadaran dan keadaban public dapat dibangun. Hingga usianya yang ke-32 ini, BPPM Balairung sudah menerbitkan 53 edisi Majalah Balairung dengan 11 edisi jurnal. Di dalamnya terdapat beberapa edisi Balkon dan Balkon Spesial. Selain itu, ada beberapa edisi Kumpulan Cerpen Terbaik Balairung (KCTB). Balairung pun

juga memiliki jaringan [www.balairungpress.com](http://www.balairungpress.com) dan mewujudkan Pusat Informasi Pers Mahasiswa Indonesia (PIPMI).

### **2.6.1 Sejarah Awal**

Sejarah berdirinya Universitas Gadjah Mada tak lepas dari perjuangan pendirinya di masa Orde Lama waktu itu. Tuntutan dan keinginan dari mahasiswa untuk bergulat dengan jurnalisme sudah ada semenjak Universitas Gadjah Mada didirikan. Oleh sebab itulah, pada 19 Desember 1949 didirikan Majalah Gadjah Mada atau yang biasa disebut dengan GAMA.

GAMA lahir di tengah tahun-tahun pertama kehidupan Universitas Gadjah Mada dan hari-hari pertama dari pembinaan Negara Republik Indonesia. Kelahirannya merupakan sumbangan almamater dan tekadnya adalah menjadi penghubung antara mahasiswa, mahasiswa dengan dosen dan pegawai, maupun mahasiswa dengan masyarakat.

Dalam dunia pers mahasiswa Indonesia yang masih muda usianya, Majalah GAMA memberi sumbangsih yang besar. GAMA menjadi inisiator kerjasama yang lebih erat antara sesama pers mahasiswa hingga mewujudkan Konferensi Pers Mahasiswa I tanggal 6 – 10 Agustus 1955 di Kaliurang melahirkan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia atau yang biasa disebut S.P.M.I SERTA Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia atau yang biasa disebut I.W.M.I. Dalam Konferensi Pers Mahasiswa II tanggal 16 – 19 Juli 1958, I.W.M.I dan S.P.M.I meleburkan diri menjadi I.P.M.I (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia). Di dalam I.P.M.I, Majalah GAMA menjadi unsur penegak utama baik di dalam pengurus maupun pengurus cabang Yogyakarta.

Di tahun ke-8 berdirinya Majalah GAMA, sumbangan-sumbangan untuk kepentingan Universitas Gadjah Mada baik untuk mahasiswa maupun kalangan pers mahasiswa selalu dimunculkan dalam setiap pergerakannya. Majalah GAMA berharap dengan kontribusinya tersebut menjadi peran pentingnya dalam ikut menunjang pembangunan masyarakat Indonesia.

Pada awal berdiri, Majalah GAMA dikepalai oleh beberapa tokoh, seperti Maschun Sofwan, Mashfar Djamin, Zakaria Idris, Lexy T. Pattipeilohy, M. Toha, pernah duduk di Dewan Pimpinan. Sedangkan Budi Darmi, Amir Prawiro, Roedjito masuk dalam jajaran Dewan Redaksi. Untuk posisi ilustrasi, Hari Sukarto dan Sabdo Walujo pernah mengisi. Kemudian, nama Atjep Suwartono, Ahmad Djari, dan Setyaningsih Roestamadji juga sempat ada dalam jajaran tata usaha.

Guru besar antropologi Ragawi FK UGM yaitu Prof. DR. T. Jacob dan juga guru besar ilmu hukum lingkungan, Dr.Koesnadi Hardjasumantri pernah menjadi pengelola media ini. Dan keduanya pernah memimpin IPMI. Namun dalam perjalanan waktu, pers mahasiswa pun menjadi tidak jelas nasibnya.

Selain GAMA, ada juga koran kampus UGM yang diberi nama GEMA (Gelora Mahasiswa). GEMA terbit tahun 1974. Jika Majalah GAMA diterbitkan oleh Gama Press, GEMA diterbitkan oleh Dewan Mahasiswa. GEMA lebih akrab dengan gerak mahasiswa yang marak di tahun 1970-an. GEMA kala itu dipimpin oleh Suprijadi RS, ditemani oleh Peter Hagul, Bambang Subroto, Lerman Sipayung, Inu Subijanto, Eddot Soepraba dan Koko Widjanarko. GEMA edisi perdana yang terbit pada Juli 1974 pun menjadi ajang kompetisi, kancah beradu ide, kancah bertanding prestasi.

GEMA pun pernah dipimpin oleh mantan Pemimpin Redaksi Majalah Editor-yang sempat berubah nama menjadi Tiras, yaitu Saur Hutabarat. Bersamaan dengan Saur yang saat itu menjadi Pemimpin Umum, NKK/BK telah membuat iklim kemahasiswaan di Indonesia menjadi tidak kondusif. GEMA dibredel oleh rektornya sendiri. Sejak saat itulah, dunia pers mahasiswa di tingkat universitas pun mengalami kevakuman.

Iklim dunia mahasiswa Indonesia tahun '80-an tergilas oleh normalisasi kehidupan kampus. Berbagai saluran aktivitas dan kreativitas kemahasiswaan yang dibubarkan rupanya mampu menumbuhkan apatisme, serta menumpulkan kepedulian sosial mahasiswa.

Pada tanggal 29 Oktober 1986, Seminar Pers Mahasiswa diselenggarakan oleh Majalah Clapeyron, majalah mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM. Seminar tersebut menghasilkan satu rumusan yang lebih mirip dengan petisi. Adanya keinginan agar di tingkau universitas diterbitkan bentuk majalah, dengan disertai ketentuan para pengurusnya, membuat Prof. Dr. T. Jacob, rector pada waktu itu, mendukung penuh gagasan yang sedang direncanakan oleh mereka. Ada beberapa nama yang masuk dalam tim perumus untuk mewakili para peserta mengabstraksikan hasil seminar. Beberapa namaa itu diantaranya : Abdul Hamid Dipopramono (ketua), Agus Aman Santoso (anggota), Ana Nadya Abrar (anggota), M. Thoriq (anggota), Mohamad Alfaris (anggota), Laksono T. Sulaiman (anggota), Agus Ibar Santosa (anggota), Bambang Suhadjanto (anggota), Anwar Muhadi (anggota), dan Hendro Saptono (anggota). Nama-nama yang sudah tergabung

dalam tim perumus tersebut kemudian menugaskan panitia seminar (Clapetron) untuk memproses hasil rumusan lebih lanjut.

Setelah melalui proses, pada 2 November 1985, lahirlah pasukan komando panitia dengan ketua Aried Wicaksono dan sekretaris umum Ateng Tohari. Utusan tim perumus dan panitia pun membawa hasil perumusan ke Rektor. Prof. T. Jacob juga sangat mendukung di UGM didirikan penerbitan mahasiswa tingkat universitas. Rektor pun menginginkan pasukan panitia komandi diresmikan berdirinya pada tanggal 19 Desember 1985 saat perayaan ulang tahun UGM yang ke-36. Pernyataan Rektor ini pun disaksikan oleh Purek III. Selain itu, majalah Balairung pun sudah harus diterbitkan pada 25 Desember 1985. Oleh karena itu, majalah tingkat universitas UGM yang bernama BALAIRUNG akhirnya terbit perdana di 8 Januari 1986.

## 2.6.2 Struktur Organisasi Balairung

**Tabel 2.2 Struktur Pimpinan Harian**

Pemimpin Umum	Citra Maudy Mahanani
<i>Sekretaris</i>	Nabila Rieska Maulani
<i>Bendahara</i>	Henny Ayu Amalia
<i>Penanggungjawab Perpustakaan</i> <i>Hasbi Lallo</i>	Rio Bagus Saputra
<i>Penanggungjawab Indeksasi Arsip</i>	Abilawa Ihsan
<i>Webmaster</i>	Rizal Zulfiqri Ahmad
<i>Tim Perintis Pembuatan Rencana</i> <i>Strategi</i>	Luqman Abdul Malik, Afal Ranggajati, Jalu Tathit Pancapurna

**Tabel 2.3 Divisi Perusahaan**

<i>Pemimpin</i> <i>Perusahaan</i>	Salsabilla
<i>Koordinator Tim</i> <i>Media Sosial</i>	Priscilla M. Bening Situmorang

<i>Staf Perusahaan</i>	Annisa Alfath, Dimas Maqrufi, Priscilla M. Bening Situmorang, Rizky Aditya S., Angkie Hendrata, Zarah Lintang Astity, Tiara Putri M, Siti Nurul Mahmudah
------------------------	---

**Tabel 2.4 Divisi Redaksi**

<i>Pemimpin Redaksi</i>	Cintya Faliana Dewi
<i>Koordinator Tim Media Sosial Redaktur Isu</i>	Priscilla M. Bening Situmorang Ahmad Fauzi, Harrits Arrazi, Fahmi Sirma Pelu
<i>Staff Redaksi</i>	Anggriani Mahdianingsih, Anisa Nur Aini, Ayu Nurfaizah, Fatima Gita Elhasni, Hanif Janitra Satriawan, Lorient Meyse, Maheswara Nusantoro, Muhammad Nur Khoirul Fajar, Nabila Rieska M., Nadia Ayu Setiyaningbudi, Noor Rasya S. Anindyanari, Norman Arief Gunarto, Putri Soleha, Rahma Ayu Nabila, Rinaldi Hadisaputra, Rizal Zulfiqri Ahmad, Vania Rebecca C., Hasya Nindita, Henny Ayu Amalia, Lailatul Zunaeva, Litalia Putri Cahayani, Monica Bening Maeria Anggani, Hutri Cika Agustina Berutu, Rainhard Sitohang, Dianita Ermilasari, Maghvira Arzaq Karima, Marcelinus Justian Priambodo, Afifah Fauziah, Setyaningrum, Abdul Qoyyum,

	<p>Muhammad,  Fadhilah Pradana,  Huffazh Abdalla Mumtaz,  Muhammad Fakhri Afdhal,  Harsya Kurnia Ardha,  Dewinta Lukita Sari,  Nadia Intan Fajarlie,  Anis Nurul Ngadzimah,  Karina Fitria Kurniawan,  William Calvin Pontoh,  Rosita Dwi Purna,  Adrianto Shifa Al Aro,  Rizqansyah Fitramadhana,  Rizqika Ramadhan,  Iqbal Almuntarie,  Zahara Nisa Fadila,  Gaudio,  Virgolilius,  Widya Rafifa Salsabila,  Muhammad,  Arif Mumtaz,  Elvinda Farhaniyatus Saffana,  Shafira Dinda Ariefi,  Muharoman Attoriq Zayzda,  Hanifatun Nida,  Muhammad Rizqi Akbar,  Muhammad Arif Mumtaz,  Deatry,  Kharisma Karim</p>
--	---

**Tabel 2.5 Divisi Penelitian dan Pengembangan**

Kepala Riset	Alnick Muhammad Nathan
Koordinator Diskusi	Setyaningsih
Koordinator Jurnal	Wida Dhelweis Y.
Tim Jurnal	Anggriani Mahdianingsih, Tita Meydhalifah, Rizky Ramadhika, Rizky Aditya S.
Staff Riset	Beby Putri Adriansa Pane, Fadhilla Dwi P. R., Luqman Abdul Maliq, Olivia P., Rayhan Wildan, Setyaningsih, Tita Meydhalifa,

	<p>Wida Dhelweis Y.,  Ade Tri Widodo,  Jihaadir Rahman,  Arrizal Anugerah Jaknanihan,  Restia Cahyani,  Kelvin Ramadhan H,  Rahman Cahaya Adiatma,  Aditya Satria Ramadhan,  Natrila Femigasari,  Septian Galuh Hujianto,  Safira Rizky Mayla Aziz,  Savero Aristia Wienanto,  Hafiza Dina Islamy,  I Made Adi Prema Nanda,  Muhammad Hasbul Wafi,  Anugrah Aditya Insani,  Herlambang Eka Persada,  Yusyiril Dwi Kurniawan,  Rizky Murdiana,  Khalil Makarim,  Zeina Rahmah Syam</p>
--	---

**Tabel 2.6 Divisi Produksi dan Artistik**

Kepala Produksi & Artistik	Maulidya Rahmania Atikah
Redaktur Artistik	Ananta Widi Raihan, Clarisa, Deny Reza
Staf Produksi & Artistik	Clarissa Dessy Uijaya, Miratul Adhami, Rizky Ramadhika Sunarso, Upavasa Cyadzidananda, Fitria Dewi Sartika, R Gilang Septa Mulya, Ananta Widi Raihan, Amar Ma'ruf Irfan, Andrea N. Khalis, M. Rohman Irfanuddin, Antonius Harya F. W., M. Rhusmul Khandiq, Nisa Nur Haniva, Syfa Amelia, Arjun Pratiq Zamzamy S., Dzikrika Rahmatu Hayati, Pitaloka Ainun Yasmin,

	Akbar Wahyu Illahi, Fitra Anas, Desta Nugraha, Deardra Nurriel, Dian Aris Munandar, Stanislaus Axel Paskalis, Nadira Amelia, Linus Randu Danardya
--	--

**Tabel 2.7 Pengurus Koordinator dan Kreatif**

<i>Koordinator</i>	Beby Pane
Kreatif	Andara Rose, Fadhilla Dwi P. R., Ananta, Priscil

### **2.6.3 Pedoman Pemberitaan dalam Balairung**

Pedoman pengelolaan media siber seperti [www.balairungpress.com](http://www.balairungpress.com) memiliki karakter khusus sehingga pedoman pengelolaannya pun seharusnya dapat dilaksanakan secara professional, memenuhi fungsi, hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Berangkat dari situlah, Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat mulai menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

#### **2.6.3.1 Ruang Lingkup**

Segala bentuk media yang menggunakan internet sebagai sarana dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik, disebut sebagai Media Siber. Media Siber haruslah memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

Artikel, gambar, komentar, audio, video, maupun berbagai bentuk unggahan atau segala isi yang dibuat dan dipublikasikan oleh pengguna media siber sendiri disebut sebagai Isi Buatan Pengguna atau *User Generated Content*.

### **2.6.3.2 Verifikasi dan Keberimbangan Berita**

Verifikasi adalah tahap yang harus dilalui oleh setiap berita. Proses ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan. Kalaupun ada pihak yang komplain dan merasa dirugikan, verifikasi akan dilakukan sebelum berlanjut pada klarifikasi pada berita yang sama. Pada prinsipnya, setiap berita harus memenuhi aspek akurasi dan keberimbangan. Berita yang layak tayang juga harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut: berita benar-benar memiliki unsur kepentingan public yang mendesak; sumber berita pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya ; kompeten serta kredibel ; subyek berita yang keberadaannya tidak dapat dilacak dan tidak dapat diwawancarai minimal harus dikonfirmasi kebenarannya; klarifikasi juga harus diberikan oleh media kepada pembaca sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan verifikasi tersebut akan diupayakan dalam waktu secepatnya.

Pada bagian akhir berita yang sama, penjelasan dimuat di bagian akhir dengan penulisan di dalam kurung serta menggunakan huruf miring. Setelah menggugurkan kewajiban untuk memenuhi kriteria berita seperti butir di atas, media kemudian wajib meneruskan ke tindakan verifikasi. Setelah itu, verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan dalam berita yang belum terverifikasi.

### **2.6.3.3 Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*)**

Syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna wajib dicantumkan oleh media siber agar produk yang dihasilkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang ditempatkan secara terang dan jelas. Untuk bisa mempublikasikan bentuk Isi Buatan Pengguna, ketentuan wajib registrasi keanggotaan serta proses log-in diberlakukan untuk setiap pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. Media siber mewajibkan penggunanya untuk melakukan persetujuan tertulis ketika melakukan registrasi. Persetujuan tertulis tersebut berisi tentang Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan hendaknya : tidak ada muatan bohong, fitnah, sadis maupun cabul; tidak mengandung perkataan dan ujaran yang menimbulkan prasangka atau kebencian yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau tindakan kekerasan; tidak ada muatan diskriminatif jenis kelamin dan bahasa, maupun tendensi untuk merendahkan martabat orang lemah, sakit, cacat jiwa, jasmani, maupun golongan miskin.

Catatan-catatan mendasar dalam kode etik jurnalisme online dirilis oleh mantan Komisioner Komisi Komunikasi Amerika Serikat, yaitu Nicholas Johnson. Hal-hal tersebut diantaranya pelarangan penyerangan kepentingan individu, pencemaran nama baik, serta pembunuhan karakter atau reputasi seseorang. Kode Etik Jurnalistik dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam pasal 3 disebutkan, “Wartawan Indonesia pantang untuk menyiarkan karya jurnalistik (baik itu bentuknya tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan karena memutar balik fakta, memicu fitnah, cabul, dan sensasional.”

#### **2.6.4 Berita Kekerasan Seksual di Balairung**

Tidak ada kuantitas secara pasti yang bisa menghitung berapa jumlah berita kekerasan seksual yang telah diproduksi oleh Balairung. Dalam kurun waktu 2017-2019, saat diwawancara, Pemimpin Redaksi, Cintya Faliana menyebutkan Balairung sudah memproduksi dua berita kekerasan seksual.

Berita pertama diterbitkan di Majalah Balairung edisi 54/TH.XXXIII/2018 yang berjudul “Malang Melintang Penanganan Pelecehan Seksual di Kampus” dan berita kedua dimuat di media daring Balairungpress dengan judul berita “Nalar Pincang UGM atas Kasus Pemerkosaan”.

Balairung sendiri tidak pernah berfokus untuk mengadakan tim redaksi yang ditugasi khusus untuk mengerjakan liputan mengenai kekerasan seksual. Proses pendelegasian hanya berlangsung satu arah, yaitu ketika redaktur isu bersama sama Pimred memiliki pertimbangan untuk mempercayakan staf ataupun redaktur lain yang dinilai memiliki kepekaan atau wawasan yang mumpuni untuk mengerjakan reportase tersebut.

#### **2.7 Objektifikasi Perempuan dalam Berita Kekerasan Seksual**

Teori komunikasi feminis menempatkan perempuan dan pengalaman mereka di pusat studi komunikasi dan produksi teori (Rofiq, 2018:2). Dalam perkembangannya feminisme mengangkat isu-isu strategis mengenai kesetaraan gender perempuan. Feminisme seringkali disalahartikan seperti dianggap sebagai gerakan dari Barat dan gerakan perempuan yang membenci laki-laki (Prabasmoro, 2006:19). Littlejohn (dalam Ismail, 2015:35) mengutarakan bahwa teori

komunikasi feminis memberikan spekulasi serta penjelasan tentang strategi komunikasi yang digunakan untuk menindas perempuan serta mengungkap bahasa yang dicetuskan perempuan untuk mengatasi penindasan tersebut. Feminisme mengangkat kesetaraan perempuan terhadap dominasi yang sudah terstruktur di dalam banyak lapisan masyarakat di dunia.

Mulvey (dalam Rofiq, 2018:10) menjelaskan motivasi berbeda dari suatu penjelasan fungsi ketelanjangan laki-laki dan perempuan. Ketelanjangan perempuan di dalam teks biasanya ditujukan untuk kesenangan visual dan untuk memotivasi seksual. Sedangkan ketelanjangan laki-laki tidak ditujukan untuk memotivasi seksualitas, namun lebih kepada menampilkan kekuatan fisik dan tindakan efektif. Oleh karena itu, prevalensi objek perempuan telah menciptakan sebuah budaya untuk menempatkan laki-laki dipahami sebagai mereka yang melihat, sedangkan perempuan dipahami sebagai yang dilihat.